

**BAB V**  
***POLITICAL ENGAGEMENT* DAN RASIONALITAS PEMILIH**  
**MASYARAKAT KOTA PADANG PANJANG**

**5.1 Pengantar**

Pada bab V ini peneliti menyajikan beberapa temuan penting yang diperoleh selama investigasi lapangan. Temuan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana *political engagement* masyarakat Padang Panjang dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dan bagaimana konteks rasionalitas masyarakat Padang Panjang ketika mereka memutuskan untuk tidak terlibat dalam Pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Untuk memahami *political engagement* masyarakat Padang Panjang dan konteks rasionalitas masyarakat Padang Panjang, peneliti mengambil konsep teori yang dikemukakan oleh Saiful Mujani (2007) dan Bismar Arianto (2011) saat melakukan wawancara.

Selanjutnya pada bab V ini peneliti juga menganalisis beberapa penyebab alasan masyarakat Padang Panjang ketika tidak memilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang peneliti analisis dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan lapangan.

**5.2 *Political Engagement***

**5.2.1. Minat atau Ketertarikan Pada Politik**

Keterlibatan politik (*political Engagement*) dan sikap percaya pada institusi politik merupakan dua bagian dari budaya demokrasi. Kombinasi antara keduanya amat krusial bagi partisipasi politik dan dukungan pada sistem demokrasi. Keterlibatan politik dapat dipahami sebagai sejauh mana seseorang terlibat dalam politik atau peduli dengan persoalan politik. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan minat atau ketertarikan pada politik adalah tingkat sejauh mana politik meningkatkan keingintahuan seorang warga negara. Pengertian ini lebih menekankan keingintahuan daripada motivasi, keingintahuan berupa dorongan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan tentang politik. Temuan ini peneliti

temukan berdasarkan wawancara dengan Syafrudin (30) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tertarik, karena kalau dilihat-lihat jika kita mengikuti politik ini menarik pula karena politik itu sesuatu yang dinamis yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu”<sup>55</sup>

Pernyataan Syafrudin ini juga diperkuat dengan temuan wawancara dengan Yasiful (44) sebagai berikut:<sup>56</sup>

“Secara pribadi saya tertarik dengan politik, memang cuma sampai di situ, tidak mau terjun dan mengikuti sekedar tertarik saja. Mungkin istilah di sini agar kita mengetahui sudah sampai di situ saja. Untuk lebih lanjutnya saya tidak pernah ikut memilih dari awal sampai sekarang umur saya 44 tahun belum pernah memilih”

Sejarah politik dan pemerintahan yang sudah ada sejak dulu juga menjadi alasan ketertarikan seseorang terhadap politik. Hal ini berdasarkan temuan peneliti dilapangan berdasarkan wawancara dengan Junaidi (42) yang menyatakan sebagai berikut:

“Cukup tertarik pada masalah politik dan pemerintahan di Indonesia karena sebenarnya negara Indonesia sejak dulu ditentukan oleh politik juga baik itu pemimpin-pemimpin sebelumnya yang dipilih dari pemilu”

Ketertarikan pada politik berdasarkan pernyataan dari Syafrudin dan Yasiful hanya sebatas mengikuti perkembangan politik agar tidak terlalu ketinggalan dengan berita-berita politik yang terjadi saat ini. Sedangkan ketertarikan pada hal politik berdasarkan pernyataan Junaidi hanya sebatas politik itu sudah ada sejak dulu lebih ke arah sejarahnya seperti pemimpin-pemimpin terdahulu yang juga dipilih berdasarkan proses pemilu. Ketertarikan pada politik ini tidak dibarengi dengan ikut berpartisipasi pada pemilihan. Untuk tertarik pada politik tidak serta-merta berarti termotivasi untuk berpartisipasi dalam bentuk aksi politik. Ekspresi subjektif dari ketertarikan pada politik yang tinggi tidak selalu mengimplikasikan motivasi politik, seseorang bisa saja tertarik pada drama politik karena alasan yang sama sekali tidak politik. Sebagaimana dikatakan Priyo Bagoes Pribumi bahwa minat adalah sumber motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu atau menyukai sesuatu tanpa ada paksaan dari pihak luar. Minat juga dipengaruhi oleh

---

<sup>55</sup>Wawancara informan Syafrudin pada Tanggal 17 Februari 2023

<sup>56</sup> Wawancara informan Yasiful pada Tanggal 26 Januari 2023

persepsi awal dari setiap individu terhadap pemilihan, semakin baik persepsi individu terhadap pemilihan maka semakin tinggi minat individu menggunakan hak suaranya dalam pemilihan.<sup>57</sup>

Berbeda dari pernyataan Syafrudin dan Yasiful, peneliti menemukan bahwa seseorang sama sekali tidak tertarik dengan politik bahkan tidak mau ikut campur dengan yang namanya politik. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Rahmat Hidayat (33) pada saat wawancara yaitu sebagai berikut:

“Tidak tertarik karena kurang suka dibagian politik baik itu orangnya maupun partainya”<sup>58</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Marnis (31) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Tidak tertarik, tidak minat dengan politik itu, sama orang-orang politik itu rasanya tidak ada manfaatnya”<sup>59</sup>

Pernyataan dari kedua informan tersebut dikuatkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Maira Nasrul (21) sebagai berikut:

“Tidak tertarik soalnya di politik itu cuma mencari kekuasaan saja, yang harusnya membantu masyarakat tetapi malah menguntungkan partai politiknya saja”<sup>60</sup>

Di samping melakukan wawancara dengan Maira Nasrul, peneliti juga melakukan wawancara dengan Syafrizal (36) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak tertarik, tidak suka dengan pemerintah dan partai politik, banyak janji-janji manis saja”<sup>61</sup>

Pernyataan Maira Nasrul tersebut dikuatkan dengan pernyataan Sovia (61) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak tertarik pada masalah politik dan pemerintahan di Indonesia dikarenakan saya tidak suka sama politik, ya kurang suka saja sama politik itu”<sup>62</sup>

---

<sup>57</sup>Priyo Bagoes Pribudi, Skripsi: “Analisis Minat Memilih Mahasiswa ITS Pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 2014”. (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember). Hlm. 14

<sup>58</sup> Wawancara informan Rahmat Hidayat pada Tanggal 15 Februari 2023

<sup>59</sup> Wawancara informan Marnis pada Tanggal 19 Maret 2023

<sup>60</sup> Wawancara informan Maira Nasrul pada Tanggal 30 Januari 2023

<sup>61</sup> Wawancara informan Syafrizal pada Tanggal 16 Februari 2023

<sup>62</sup> Wawancara informan Sovia pada Tanggal 18 Februari 2023

Ketidaktertarikan pada politik disebabkan citra politik sendiri, skeptis terhadap politik itu sendiri seperti tidak tertarik dengan partai politik maupun orangnya, tidak ada manfaatnya jika mengenal politik, politik hanya mencari kekuasaan saja, politik itu banyak janji-janji manis yang tidak ditepati. Disamping alasan citra politik, alasan pribadi juga menjadi alasan ketidaktertarikan seseorang. Temuan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Erlizawaty (55) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak tertarik dengan masalah politik di Indonesia karena saya sebagai ibu rumah tangga cuma tertarik dengan kegiatan sehari-hari rumah tangga seperti mencuci, memasak”<sup>63</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Abrar (27) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak terlalu tertarik karena kesibukan juga, kesibukan kerja, makanya saya tidak tertarik dengan politik”<sup>64</sup>

Pernyataan Erlizawaty dan Abrar diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Fitri (25) yang menyatakan sebagai berikut:

“Kurang tertarik pada masalah politik dan pemerintah karena lebih tidak ada waktu untuk politik karena sibuk kerja dari pagi sampai malam”<sup>65</sup>

Tidak terlalu suka politik, tidak mau ambil pusing, tidak ada kepikirantentang politik serta politik sekarang banyak curangnya juga menjadi alasan ketidaktertarikan pada politik. Hal ini berdasarkan temuan yang peneliti temukan di lapangan berdasarkan wawancara dengan Oky Pratama (29) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak tertarik sama masalah politik dan pemerintahan karena tidak mau ambil pusing dengan masalah politik”<sup>66</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Putri Rahma Sari (23) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak tertarik pada masalah politik dan pemerintahan di Indonesia karena memang tidak ada kepikiran kesitu, tidak ada kepikiran politik itu”<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan informan Erlizawaty pada 2 maret 2023

<sup>64</sup> Wawancara dengan informan Abrar pada 12 februari 2023

<sup>65</sup> Wawancara dengan informan Fitri pada 27 Januari 2023

<sup>66</sup> Wawancara dengan informan Oky Pratama pada 18 Februari 2023

<sup>67</sup> Wawancara dengan informan Putri Rahma Sari pada 18 Februari 2023

Begitu juga dengan wawancara bersama Hayatul Ilham (17) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak tertarik dengan masalah politik dan pemerintahan di Indonesia karena saya tidak terlalu suka politik, tidak suka saja”<sup>68</sup>

Pernyataan Hayatul Ilham juga diperkuat oleh pernyataan Maizul (57) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak tertarik dengan masalah politik dan pemerintahan di Indonesia karena kebanyakan politik di Indonesia berjalan tidak lurus, banyak menyimpangnya, menghalalkan segala cara”<sup>69</sup>

Dari wawancara terhadap informan di atas secara umum dapat digambarkan bahwa ketidaktertarikan pada politik disebabkan oleh citra pelaku politik itu sendiri baik dari partainya maupun dari calegnya. Citra jelek diperoleh dari akumulasi kinerja dewan perwakilan rakyat dan kepala daerah terpilih dari pemilu dan pemilihan yang telah terjadi selama ini sehingga masyarakat sudah memiliki jejak rekam dan memori akan hal tersebut. Menurut perspektif Burhan Bungin et al mengatakan bahwa citra politik menjadi gambaran tentang seseorang yang bergerak dalam bidang politik, baik dalam posisi kekuasaannya, otoritasnya, maupun konflik dan konsensus yang dibawanya. Pada ujungnya, citra politik membuat masyarakat memiliki alasan subjektif untuk menerima atau menolak suatu peristiwa atau gagasan politik, yang berujung pada sebuah preferensi politik.<sup>70</sup>

Selain itu, ketidaktertarikan terhadap politik dikarenakan dunia politik penuh dengan sandiwara, politik hanya menguntungkan partai politik, politik itu tidak jelas arahnya kemana, dan politik itu penuh dengan trik-trik kotor. Banyaknya sentimen negatif tentang politik, mengindikasikan ada sesuatu yang salah terhadap politik Indonesia saat ini. Politik tidak harus dijauhi tetapi bagaimana kita membawa masalah politik sebagai penengah atau medium bagi

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan informan Hayatul Ilham pada 24 maret 2023

<sup>69</sup> Wawancara dengan informan Maizul pada 27 Januari 2023

<sup>70</sup> Burhan Bungin, Nurlaela Syarif, Monika Teguh, Tasya Devi Rossafine. (2019). Citra Aktor Politik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018. *Jurnal Lugas*. 3(1): 1-13

masyarakat dan politisi untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dialami oleh masyarakat.

### 5.2.2. Kedekatan dengan Partai Tertentu (*Partisanship*)

Unsur keterlibatan politik lain adalah *partisanship*, *partisanship* dapat dipahami sebagai identifikasi masyarakat yang mempunyai kedekatan dengan partai politik. Demokrasi modern tidak bisa lepas dari partai politik, sedangkan kekuatan politik kepartaian sangat tergantung pada dukungan warga negara terhadap partai politik. Kedekatan yang dimaksud adalah dekat dengan salah satu partai politik dan memiliki relasi dengan partai politik. Oleh sebab itu, dari sudut pandang sikap politik, *partisanship* sangat penting untuk menyukkseskan demokrasi. Adapun jumlah partai yang ada di Kota Padang Panjang Tahun 2020 yaitu 14 partai politik. Berikut partai politik yang ada di Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Partai Politik Yang Ada di Kota Padang Panjang**

No.	Nama Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	PDI Perjuangan (PDIP)
4.	Partai Golkar
5.	Partai Nasdem
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

#### 14. Partai Demokrat

Sumber: Data sekunder berdasarkan Data KPU Kota Padang Panjang yang sudah diolah Tahun 2023

Adanya kedekatan dengan partai politik bisa membawa demokrasi berjalan lancar jika disertai dengan ikut berpartisipasi waktu pemilu maupun pemilihan tetapi hal ini tidak begitu demikian mestinya karena berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari Yasiful (44) menyatakan sebagai berikut:

“Tidak pernah dan tidak mau dekat juga dengan partai politik sedangkan relasi dengan partai politik tidak ada karena tidak pernah dekat dengan partai”<sup>71</sup>

Selain melakukan wawancara dengan Yasiful, peneliti juga melakukan wawancara dengan Maizul (57) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada kedekatan dengan salah satu partai, kalau kawan kerja di partai ada tapi saya tidak tertarik sama politik”<sup>72</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Abrar (27) sebagai berikut:

“Tidak ada kedekatan dengan partai tetapi kalau saudara saya pernah menjadi calon legislatif (caleg) tetapi sekarang sudah tidak ikut partai karena tidak terpilih waktu pemilu”<sup>73</sup>

Pernyataan Abrar ini juga didukung dengan pernyataan dari Syafrudin (30) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak pernah ada kedekatan dengan partai politik, kalau teman ada yang gabung akhir-akhir ini ke partai politik tetapi hubungan saya dengan dia tidak hubungan yang intens atau tidak dekat”<sup>74</sup>

Tidak ada kedekatan dengan partai politik merupakan contoh kemunduran demokrasi sebab negara yang berdemokrasi membutuhkan partai politik. Partai politik menjadi tulang punggung dalam proses jalannya demokrasi di Indonesia.

---

<sup>71</sup> Wawancara informan Yasiful pada Tanggal 26 Januari 2023

<sup>72</sup> Wawancara informan Maizul pada Tanggal 27 Januari 2023

<sup>73</sup> Wawancara informan Abrar pada Tanggal 12 Februari 2023

<sup>74</sup> Wawancara informan Syafrudin pada Tanggal 17 Februari 2023

Semua proses yang terjadi di pemerintahan tidak bisa lepas dari partai politik bahkan di Lembaga-lembaga negara lainnya juga membutuhkan partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sovia (61) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada kedekatan dengan salah satu partai politik dan tidak ada relasi dengan partai politik tertentu”

Hal senada juga diungkapkan Oky Pratama (29) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak ada kedekatan dengan salah satu partai politik dan juga saya tidak punya relasi dengan partai politik tertentu”

Pernyataan dari kedua informan tersebut dikuatkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Erlizawaty (55) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak pernah dekat dengan salah satu partai dan tidak punya relasi dengan partai politik tertentu”

Di samping melakukan wawancara dengan Erlizawaty, peneliti juga melakukan wawancara dengan Rahmat Hidayat (33) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada kedekatan dengan salah satu partai politik dan tidak ada relasi dengan partai politik tertentu”

Begitu pentingnya partai politik untuk dipertimbangkan, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Pernyataan ini sering diperbincangkan karena hal ini didasarkan pada fakta-fakta berikut: sistem partai politik merupakan salah satu pilar penting pembangunan sistem demokrasi Lembaga pemilu, eksekutif, legislatif, yudikatif dan kebebasan pers. Padahal kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi sangat penting, tanpa partai politik yang kuat tidak akan ada demokrasi yang kuat.

<sup>75</sup> Tidak adanya kedekatan dengan politik dan tidak ada relasi dengan partai politik tertentu dapat menghambat demokrasi itu sendiri. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Maira Nasrul (21) yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. *Politica*. 10 (1): 17-38



“Saya tidak punya kedekatan dengan salah satu partai politik dan tidak ada relasi dengan partai politik tertentu”

Sedangkan dari pernyataan Putri Rahma Sari (23) juga menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak ada kedekatan dengan salah satu partai politik dan juga saya tidak punya relasi dengan partai politik tertentu”

Hal senada juga diungkap oleh Marnis (31) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada kedekatan dengan salah satu partai politik dan tidak ada relasi dengan partai politik tertentu”

Pernyataan dari Marnis dibenarkan oleh Junaidi (42) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak, Tidak ada kedekatan dengan partai politik dan saya juga tidak punya relasi dengan partai politik”

Pernyataan dari Marnis dan Junaidi diperkuat oleh pernyataan Fitri (25) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak ada kedekatan dengan salah satu partai politik dan juga saya tidak punya relasi dengan partai politik tertentu”

Padahal *Partisanship* berperan dalam menstabilkan perilaku pemilih, tingkat *partisanship* yang menurun sama saja dengan merosotnya unsur-unsur yang menstabilkan perilaku pemilih. Menurut Mujani ketika *partisanship* berkurang, *electoral volatility* (bergonta-gantinya pilihan kepartaian seorang dari satu pemilu ke pemilu atau pemilihan lainnya) akan cenderung meningkat. Titik terendah dalam *partisanship* adalah menaikkan prospek partai-partai baru untuk dipilih.<sup>76</sup> Dengan demikian, *partisanship* berperan dalam mobilisasi warga negara ke dalam partisipasi politik yang konvensional dan menjadi landasan yang kokoh bagi pilihan kepartaian seseorang. Bahkan, partisanship dipandang memengaruhi persepsi individu berserta dengan evaluasi isu-isu dan kandidat sehingga pada akhirnya diujung corong sebagai pilihan suara itu sendiri.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Saiful Mujani. (2007). *Muslim Demokrat: Islam, Partisipasi Politik, dan Budaya Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Gramedia. Hlm. 192

<sup>77</sup> Haryanto. (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 17(3):291-308

Pernyataan yang sama juga diungkapkan Hayatul Ilham (17) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak pernah dekat dengan salah satu partai dan tidak punya relasi dengan partai politik tertentu”

Pernyataan dari Hayatul Ilham diperkuat oleh pernyataan Syafrizal (36) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak ada kedekatan dengan salah satu partai politik dan tidak ada relasi dengan partai politik tertentu”

Apa yang diungkapkan oleh informan di atas, didukung oleh Andri Rusta (41) sebagai informan triangulasi yang menyatakan sebagai berikut:

“Hal ini terjadi karena itulah fenomena yang ada di Indonesia saat ini, banyak masyarakat di Indonesia tidak ada *Party Id*, tidak ada politik identitasnya, tidak ada kedekatan dengan partai politik. Jika mereka tidak dekat dengan partai politik maka mereka tidak perlu dekat partai tersebut. Hal itu memang betul adanya, jadi memang betul jika mereka dekat dengan partai maka dengan sendirinya mereka akan jadi partisan aktif begitupun sebaliknya jika mereka tidak dekat dengan partai maka mereka akan jadi partisan pasif”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada kedekatan dengan partai politik, tidak pernah dekat dengan partai politik dan tidak mau dekat dengan partai politik. Informan wawancara terlihat

enggan atau ogah dekat dengan partai politik karena mereka tidak mau memikirkan carut marut atau ribetnya partai politik itu bekerja tetapi mereka juga tidak membatah kalau mereka mempunyai relasi dekat dengan partai politik baik itu teman yang kerja di partai politik, maupun saudara yang pernah menjadi caleg

di salah satu partai. Walaupun demikian, mereka mengakui tidak mau dekat dengan partai meskipun ada teman maupun saudara yang kerja di salah satu partai.

*Partisanship* juga mempunyai peran dalam mempromosikan kepercayaan pada legitimasi dan sikap percaya pada politik, dan *partisanship* berpengaruh langsung pada stabilitas sistem kepartaian dan secara tidak langsung pada stabilitas tatanan politik itu sendiri. Hal inilah menjadi taruhannya jika

---

<sup>78</sup> Wawancara informan Andri Rusta pada Tanggal 6 Juni 2023

*partisanship* merosot atau memudar. *Partisanship* yang kuat yang dibarengi dengan toleransi yang tinggi terhadap partai lain dipercaya merupakan hal yang positif bagi stabilitas demokrasi. Sebaliknya, *partisanship* yang tinggi tanpa toleransi bisa mengarah pada konflik politik yang menyebabkan instabilitas demokrasi.

### 5.2.3. Diskusi Politik

Berbagi gagasan, berbagi informasi, dan menemukan solusi tentang politik maupun isu-isu politik yang sedang terjadi adalah siklus dalam diskusi politik. Diskusi politik memang tidak relevan dibicarakan waktu acara kumpul-kumpul bersama teman, keluarga, rekan kerja. Seseorang cenderung akan menghindari jika teman atau keluarga berbicara politik karena menurut mereka mendiskusikan politik ini sangatlah berat dan makin menambah beban pikiran mereka sendiri. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan mengungkapkan bahwa mereka tidak suka mengikuti diskusi politik karena hal itu tidak begitu penting dan dengan mereka mengikuti diskusi politik mereka tidak terdorong juga untuk memilih waktu pemilu atau pemilihan yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan temuan yang peneliti temukan dari wawancara dengan Hayatul Ilham (17) sebagai berikut:

“Tidak dan sangat jarang sekali saya melakukan diskusi politik dan menurut saya hal itu tidak begitu penting dan dengan adanya diskusi politik juga kayaknya tidak mendorong saya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan yang akan datang”<sup>79</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Oky Pratama (29) sebagai berikut:

“Tidak sama sekali saya melakukan diskusi politik karena tidak penting dan kalau tidak ada siaran lain baru saya lihat siaran diskusi politik yang ditayangkan di televisi serta dengan adanya diskusi politik tidak menjamin saya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan yang akan datang, saya akan pikir-pikir dulu sebelum memilih”<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara informan Hayatul Ilham pada Tanggal 24 Maret 2023

<sup>80</sup> Wawancara informan Oky Pratama pada Tanggal 18 Februari 2023

Selain melakukan wawancara dengan Oky Pratama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Marnis (31) sebagai berikut:

“Saya jarang sekali melakukan diskusi politik dengan teman, saudara, maupun keluarga karena menurut saya mengikuti diskusi politik tidak hal penting dan saya juga jarang menonton televisi apalagi yang berhubungan dengan siaran politik dan dengan adanya diskusi politik tidak juga mendorong saya untuk memilih dalam pemilu maupun pemilihan yang akan datang”<sup>81</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Junaidi (42) yang menyatakan sebagai berikut:

“Ada sedikit-sedikit kami berbincang di warung dalam hal diskusi politik dan menurut saya sebenarnya ada pentingnya juga melakukan diskusi politik dimana masyarakat bisa menentukan siapa yang mewakili masyarakat waktu pemilihan yang akan datang”

Hal senada juga diungkapkan oleh Fitri (25) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak ada melakukan diskusi politik dengan teman, saudara, maupun keluarga tetapi menurut saya diskusi politik itu penting, alasannya karena untuk memilih pemimpin tentu harus kita ikuti jejak rekamnya serta dengan adanya diskusi politik bisa mendorong seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan”

Pernyataan Junaidi dan Fitri juga diperkuat oleh pernyataan Maira Nasrul (21) yang menyatakan sebagai berikut:

“Ikut diskusi sih tidak tetapi dengar-dengar sering juga dan menurut saya mengikuti diskusi politik itu penting buat tambah-tambah referensi tentang politik serta dengan adanya diskusi politik dapat mendorong ikut berpartisipasi seharusnya iya tetapi lihat nanti saja tergantung calonnya juga”

Berdasarkan pernyataan informan diatas, perbincangan atau diskusi politik perlu dilakukan karena masyarakat mendapatkan informasi seputar pemilihan yang akan datang baik siapa calon yang berpartisipasi dan partai politik apa yang akan berkoalisi. Dengan adanya informasi yang didapatkan melalui diskusi politik

---

<sup>81</sup> Wawancara informan Marnis pada Tanggal 19 Maret 2023

diharapkan masyarakat dapat menentukan pilihannya pada waktu pemilihan yang akan datang. Hal yang berbeda peneliti dapatkan dari wawancara Yasiful (44) yang menyatakan sebagai berikut:

“Boleh dikatakan tidak pernah, mungkin kalau ada juga teman-teman atau kerabat yang menjurus pembahasannya ke politik sebisa saya selalu menghindar. ya itulah sepertinya sudah anti sekali dan bagi saya pribadi mengikuti diskusi politik hal yang tidak penting. Hingga sampai saat ini tidak juga ada pengaruhnya buat saya diskusi publik itu mungkin semakin saya mengetahui saya semakin kuat untuk golput”

Hal senada juga diungkapkan oleh Erlizawaty (55) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak pernah melakukan diskusi masalah politik dengan teman, saudara, dan keluarga dan saya tidak terlalu tertarik mengikuti diskusi politik serta dengan adanya diskusi politik belum tahu bisa mendorong saya ikut berpartisipasi dalam pemilihan yang akan datang”

Pernyataan dari Erlizawaty diperkuat oleh pernyataan dari Syafrudin (30) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tidak sering mengikuti diskusi politik sekali-kali adalah, menurut pribadi saya mengikuti diskusi politik tidak begitu penting dan dengan adanya diskusi politik juga belum membuat saya tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan yang akan datang”

Pernyataan Syafrudin dibenarkan oleh Syafrizal (36) yang menyatakan sebagai berikut:

“Diskusi-diskusi negatif saja kalau berbicara tentang politik dan menurut saya tidak begitu penting mengikuti diskusi politik serta sampai saat ini dengan adanya diskusi politik tidak mendorong saya untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang akan datang”

Keadaan atau kondisi juga menjadi pertimbangan ketika seseorang untuk melakukan diskusi politik. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara Abrar (27) yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau sama teman sekali-kali ada tetapi tidak terlalu mengikuti, tergantung situasi kondisi juga kalau kita tidak mengikuti nanti kita dibilang bodoh juga atau terlalu awam, dengan adanya diskusi politik dapat mendorong berpartisipasi dalam pemilihan itu mungkin tergantung situasi juga terkadang namanya keseharian kadang kita kerja atau lagi kerja di luarKota”

Menanggapi pernyataan di atas, Andri Rusta (41) justru memiliki pernyataan yang berbeda yaitu sebagai berikut:

“Saya masih ragu jika masyarakat Padang Panjang tidak suka diskusi politik setau saya masyarakat padang Panjang itu suka diskusi politik, mungkin bahasanya tidak diskusi politik tapi bagi mereka itu “maota lapau” (mengobrol di warung), padahal “maota lapau” itu juga bagian dari diskusi politik, kalau nonton televisi memang karakter perkotaan yang saat ini memang jarang menonton televisi apalagi nonton diskusi politik di televisi karena semua sibuk dengan *handphone*, media-media sosial seperti whatsapp (WA), *facebook*, dan lain-lain, saya pikir diskusi politik Padang Panjang masih kuat tapi masalahnya mungkin masalah penamaan ya, karenakalau orang baca diskusi itu kayak ngobrol serius ya, tapi sebenarnya ketika mereka “maota dilapau”, mengobrol diantara mereka itu sudah diskusi namanya itu, tapi ketika mereka “maota” pilkada, pilkada wali kota itu sangat kental, sangat intens mereka mengobrol di warung kalau masalah pilwako (pemilihan wali kota) tapi ketika pilkada gubernur itu menjadisangat berkurang diskusinya karena tadi itu tidak ada colon berasal dari mereka makanya mereka agak kurang tertarik membahas diskusi politik”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan peneliti menyimpulkan bahwa diskusi politik dianggap sebagai hal yang tidak penting karena banyak hal yang bisa mereka diskusikan selain hal-hal yang berhubungan dengan politik dan peneliti menemukan sangat jarang informan menonton televisi yang ada siaran politiknya bahkan dari mereka ada yang sama sekali tidak menonton televisi. Menonton televisi di generasi milineal saat ini sudah banyak ditinggalkan orang. Orang banyak mencari dan menemukan berita dari media sosial dan internet pada saat ini. Menurut mereka juga, dengan diskusi politik tidak menjamin mereka akan ikut berpartisipasi dalam pemilu atau pemilihan yang akan datang. Padahal tujuan diskusi politik menurut Muhibbul Khairi dan Radhi Darmansyah sangatlah penting karena memiliki peran dalam peningkatan partisipasi politik.<sup>83</sup> Lebih lanjut diskusi politik dengan sendirinya mempunyai daya kritis terhadap proses- proses pengambilan keputusan yang akhirnya dapat membuat seseorang ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

---

<sup>82</sup> Wawancara informan Andri Rusta pada Tanggal 6 Juni 2023

<sup>83</sup> Muhibbul Kahiri, Radhi Darmansyah. (2017). Diskusi Politik Pengunjung Warung Kopi dan Partisipasi Politik Menjelang Pemilihan Walikota Banda Aceh 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. 2(2):1-12

Diskusi politik yang rendah menurut Andri Rusta terjadi karena masalah penamaan, diskusi politik itu berat bahasanya seperti ngobrol serius. Selanjutnya kenapa diskusi politik rendah karena pilkada yang berlangsung bukan pilwako (pemilihan wali kota) tetapi pilgub (pemilihan gubernur) dan calon yang maju tidak berasal dari mereka sehingga diskusi yang terjadi itu berkurang, diskusi politiknya menjadi tidak intens. Diskusi politik yang intens yang berkaitan dengan argument pro dan kontra seputar politik bisa meningkatkan pengetahuan politik peserta pemilih. Diskusi politik membuat sikap dan perilaku pemilih terbentuk dan bagi mereka yang sebelumnya terlibat dalam diskusi cenderung untuk menggunakan hak pilih dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara dibandingkan dengan mereka yang tidak suka dalam diskusi politik.

Salah satu kegiatan yang membantu pemilih pemula dalam mengambil keputusan politik adalah adanya diskusi tentang politik dengan keluarga. Sudah lama diketahui bahwa keluarga memiliki ikatan emosional yang kuat, ditambah orang tua sering berdiskusi masalah apapun dengan anaknya. Bahkan tidak sedikit pula berdiskusi tentang masalah politik, hal ini akan berdampak terhadap perkembangan politik anak kedepannya. Ketika politik menjadi menu diskusiharian anak-anak, mereka lebih mudah untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.<sup>84</sup>

#### **5.2.4. Informasi Politik**

Informasi politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan politik. Pada umumnya, informasi politik diukur dari sejauh mana seseorang tahu mengenai isu-isu politik yang sedang terjadi. Seseorang yang sering mendapat berita seputar politik lewat media massa baik media massa pada umumnya maupun media massa berbasis sosial yang menggunakan jaringan internet lebih cenderung untuk terlibat dalam politik. Semakin sering seseorang mendapatkan berita politik, maka ia akan mendapatkan banyak referensi berita politik yang akurat dan berkualitas. Media massa mempunyai fungsi sebagai jembatan penyalur antara pejabat pemerintahan, masalah politik, dan masyarakat.

---

<sup>84</sup> Khoiruddin Bashori. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*. 2(2):287-310

Dampak yang ditimbulkan dari media massa sangatlah signifikan bagi masyarakat yang peduli akan politik demokratis karena informasi yang mereka berikan seputar pejabat pemerintahan dan partai politik bisa memanipulasi pikiran mereka dari keinginan tidak memilih menjadi ikut memilih waktu pemilu atau pemilihan yang akan datang. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari Erlizawaty (55) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak sering mengikuti perkembangan berita politik dan pemerintahan yang terjadi di Indonesia, jika mendapatkan berita politik melalui media sosial pernah sekali-kali dan kalau menurut saya, saya lebih percaya televisi daripada media sosial karena kebanyakan berita di televisi itu dapat dipertanggungjawabkan dan kebanyakan berita dari medsos lebih banyak hoax daripada benarnya”<sup>85</sup>

Wawancara dengan Erlizawaty dikuatkan oleh pernyataan Yasiful (44) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak sering mengikuti perkembangan berita politik dan pemerintahan tapi sekali-kali ada, jika mendapatkan berita politik melalui media sosial sering dan menurut saya pribadi lebih banyak merusak pola pikir masyarakat soal politik di medsos karena banyak berita dari medsos yang hoax, mungkin tergantung portal berita yang menyajikan, mengupload, serta menyebarkannya tergantung portal berita yang bisa dipercaya”<sup>86</sup>

Pernyataan Erlizawaty dan Yasiful sejalan dengan pendapat Nia Sarinastiti dan Petty S. Fatimah yang mengatakan bahwa perolehan informasi politik yang diperoleh dari media sosial banyak yang belum teruji dan terverifikasi kebenarannya.<sup>87</sup> Sehingga masih banyak dari sebahagian orang masih menikmati televisi dalam mencari informasi politik ketimbang mencari informasi politik di media sosial. Berbeda dengan pernyataan Erlizawaty dan Yasiful, peneliti menemukan bahwa pemilih pemula dan pemilih yang sudah bekerja tidak pernah menonton televisi sama sekali dan mereka mendapatkan berita atau informasi lebih banyak melalui media sosial ketimbang televisi. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Fitri (25) pada saat wawancara yaitu sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Wawancara informan Erlizawaty pada Tanggal 2 Maret 2023

<sup>86</sup> Wawancara informan Yasiful pada Tanggal 26 Januari 2023

<sup>87</sup> Nia Sarinastiti, Petty S. Fatimah. (2019). Edukasi Komunikasi Politik dalam Menciptakan Kesadaran dan Minat Pemilih Perempuan. *Jurnal Kajian Komunikasi*. 7(1): 44-58



“Semenjak kerja saya jarang sekali mengikuti perkembangan berita politik dan pemerintahan, jika mendapatkan berita politik melalui media sosial ada karena kerja jadi tidak ada waktu untuk nonton televisi makanya lebih sering mendapatkan berita dari medsos dan menurut saya medsos lebih membantu daripada televisi dalam hal memahami perkembangan berita seputar politik dan pemerintahan”<sup>88</sup>

Pernyataan dari Fitri dibenarkan oleh Putri Rahma Sari (23) sebagai berikut:

“Saya tidak sering mengikuti perkembangan berita politik dan pemerintahan, jika mendapatkan berita politik melalui media sosial adakarena media sosial lebih membantu masyarakat lebih memahami perkembangan berita seputar politik dan pemerintah apalagi masyarakat seperti saya yang jarang menonton televisi dan lebih sering bermain medsos”<sup>89</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Marnis (31) sebagaimana diungkapkan seperti berikut:

“Saya tidak pernah mengikuti berita tentang politik dan pemerintahan, kalau mendapatkan berita politik dan pemerintahan melalui media sosial pernah itu pun tidak sengaja karena waktu main di media sosial gak sengaja scroll-scroll ada itu satu atau dua berita tentang politik dan menurut saya rasanya lebih banyak tau kalau berita itu dari medsos dibandingkan televisi”<sup>90</sup>

Pernyataan dari Marnis diperkuat oleh pernyataan Maira Nasrul (21) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak pernah mengikuti perkembangan berita polita politik dan pemerintahan, kalau mendapatkan berita politik dari media sosial pernah tapi sekedar tahu saja dan menurut saya berita yang berasal dari media sosial sangat membantu seperti anak milineal yang tidak menonton televisi tetapi mereka bisa tahu dari hp tentang seputar politik”

Media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat khususnya generasi milineal. Penggunaannya yang begitu massif bukan saja dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial melainkan juga untuk kepentingan ekonomi, bisnis, bahkan sampai pada kepentingan politik. Hal ini sesuai dengan temuan yang peneliti temukan pada waktu wawancara dengan Syafrudin (30) yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Wawancara informan Fitri pada Tanggal 27 Januari 2023

<sup>89</sup> Wawancara informan Putri Rahma Sari pada Tanggal 18 Februari 2023

<sup>90</sup> Wawancara informan Marnis pada Tanggal 19 Maret 2023

“Saya tidak terlalu sering mengikuti perkembangan berita politik dan pemerintahan, biasanya saya mendapatkan berita politik dan pemerintahan lebih di media sosial dan menurut saya media sosial dapat membantu masyarakat lebih memahami perkembangan politik iya apalagi bagi generasi sekarang perkembangan apapun tidak hanya politik bisa kita dapatkan di media sosial”

Rutinitas penggunaan internet menjadikan generasi milineal menjadi bagian atau segmen masyarakat yang paling banyak menggunakan media sosial. Kokom Komariah dan Dede Sri Kartini mengartikan media sosial sebagai salah satu produk masa depan dalam hal teknologi informasi berbasis internet yang secara praktis dan efektif sebagai penyebaran informasi, pengembangan pengetahuan, wadah pertukaran informasi, pengembangan usaha maupun kampanye politik.<sup>91</sup> Mengikuti perkembangan berita politik dan pemerintahan bisa juga dari cerita mulut ke mulut yang disampaikan oleh orang-orang. Hal ini berdasarkan temuan yang peneliti temukan dari wawancara Syafrizal (36) yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang langsung tidak ada tapi sekedar dengar-dengar dari orang-orang saja kalau seputar perkembangan berita politik dan pemerintahan, biasanya saya juga mendapatkan berita politik dari media sosial dan menurut saya media sosial lebih membantu daripada televisi dalam memahami perkembangan berita politik”

Hal senada diungkapkan oleh Maizul (57) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak mengikuti tapi mendengar saja dari orang lain bahwa politik di Indonesia ini masih ketinggalan dengan negara lain, kalau mendapatkan berita politik dari media sosial tidak terlalu sering dan menurut saya walaupun saat ini berita dari medsos lebih banyak tetapi masyarakat tidak segampang itu untuk mempercayai berita dari medsos tersebut”

Pernyataan dari Maizul diperkuat oleh pernyataan Junaidi (42) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya kadang-kadang mengikuti perkembangan berita politik dan pemerintahan tetapi saya tidak terlalu mengikuti berita politik yang di media sosial dan menurut saya berita yang berasal dari media sosial itu 50-50 juga yang bisa dipercaya tergantung kita mencari informasi yang dapat dipercaya”

---

<sup>91</sup> Kokom Komariah, Dede Sri Kartini. (2019). Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milineal dalam Pemilu. *ARISTO*. 7(2): 228-248

Media sosial hadir juga pada dua sisi yang berlawanan, dalam makna positif media sosial seperti membangun kesadaran dan partisipasi politik sedangkan dalam makna negative media sosial seperti digunakan untuk tujuan menghasut warga *netizen* dengan isu-isu sara maupun penyampaian berita bohong (*hoax*). Pada sisi politik media sosial dapat digunakan sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan mempengaruhi pilihan sikap. Menanggapi pernyataan dan informan di atas, Andri Rusta (41) menyatakan sebagai berikut:

“Saya pikir sama ya, semua orang sudah berpindah ke media sosial dengan buka whatsapp (WA) saja sudah tahu berita ini itu dan lain-lain, karena membaca WA, *facebook*, *Instagram* atau mengakses media sosial orang-orang bisa berjam-jam memainkannya, jika masyarakat yang berumur 40 tahun ke atas masih ada yang nonton televisi karena mereka punya waktu untuk mengkonsumsi itu, berbeda dengan anak muda sekarang yang sudah jarang menonton televisi. Untuk kebenaran berita, bagus televisi atau media sosial itu tergantung kita laginya, ada kok berita televisi yang menyebar *hoax* media sosial juga. Jadi dari kitanya saja lagi yang mencari berita yang sumbernya dapat dipercaya atau portal webnya yang dapat dipercaya”<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan peneliti menyimpulkan bahwa informasi politik tidak diikuti oleh masyarakat dan cenderung sudah meninggalkan pemberitaan seputar politik dan pemerintah. Pada era modern sekarang ini kebanyakan masyarakat sudah tidak menggunakan televisi dikarenakan kesibukan akan pekerjaan mereka sehingga tidak sempat untuk menonton televisi apalagi menonton berita politik di televisi. Peralihan media massa ke media digital juga menjadi alasan kenapa televisi sudah tidak banyak digandrungi oleh masyarakat terutama generasi muda milenial. Dengan adanya media sosial, akses berita dan informasi dengan cepat bisa didapatkan. Jika tidak mendapatkan informasi, biasanya pemilih akan menebak-nebak dan mencari yang cocok untuk mereka sehingga dampaknya adalah kesalahpahaman memilih. Hal ini tentu saja sangat disayangkan karena pemilih memilih hanya berdasarkan perasaan sesaat dan dapat berubah saat pemilihan terjadi.

---

<sup>92</sup> Wawancara informan Andri Rusta pada Tanggal 6 Juni 2023

### 5.2.5. Efikasi Politik

Perasaan seseorang akan kompetensi personalnya dalam mempengaruhi sistem politik disebut juga efikasi politik. Efikasi politik dapat dilihat dari tiga hal yaitu perasaan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah, pemerintah peduli terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat, kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Terdapat dua jenis efikasi politik yaitu efikasi internal dan eksternal. Efikasi internal adalah kepercayaan bahwa seseorang dapat memahami politik dan karenanya berpartisipasi dalam politik sedangkan efikasi eksternal mempunyai arti bahwa pemerintah akan menanggapi tuntutan seseorang dan cukup kompeten untuk membuat perubahan dalam keputusan politik.<sup>93</sup> Hal ini sama dengan temuan yang peneliti temukan di lapangan berdasarkan wawancara dengan Maizul (57) yang menyatakan sebagai berikut:

“Rasanya tidak ada pendapat atau kritikan saya yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah di Indonesia, dan apakah pemerintah atau pejabat peduli terhadap politik yang sedang terjadi saya rasa tidak dan menurut saya ada pengaruh terhadap kebijakan dan kegiatan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari”

Hal senada juga diungkapkan oleh Marnis (31) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya rasa tidak ada pendapat atau kritikan saya yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah di Indonesia, apakah pemerintah atau pejabat peduli terhadap masalah politik yang sedang terjadi mungkin sebahagian pejabat ada dan mungkin bagi orang-orang yang mendapatkan perhatian dari pemerintah ada pengaruhnya tapi bagi saya pribadi tidak ada pengaruhnya”

Pernyataan dari kedua informan tersebut dikuatkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Maira Nasrul (21) sebagai berikut:

“Saya rasa tidak ada pendapat atau kritikan saya yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah di Indonesia, apakah pemerintah atau pejabat peduli terhadap masalah politik yang sedang terjadi kayaknya tidak peduli tetapi kalau menyangkut dirinya sendiri saya rasa peduli dan menurut saya kalau diluar peraturan politik kayaknya ada pengaruhnya”

---

<sup>93</sup> Kunto Adi Wibowo, Delta Rahmawan, Azman Hamdika Syafaat. (2020). Efikasi Politik dan Jenjang Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Kajian Komunikasi*. 8(2);152-165

Di samping melakukan wawancara dengan Maira Nasrul, peneliti juga melakukan wawancara dengan Syafrizal (36) yang menyatakan sebagai berikut:

“Saya rasa tidak ada pendapat atau kritikan saya yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah di Indonesia, apakah pemerintah atau pejabat peduli terhadap masalah politik yang sedang terjadi saya tidak tahu dan menurut saya kalau di lingkungan saya tidak ada pengaruh dari kebijakan dan kegiatan pemerintah”

Lebih lanjut Albert Bandura menjelaskan bahwa efikasi politik mempunyai kontrol penuh terhadap peristiwa yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pengaruh yang mereka kendalikan untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan serta untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemampuan untuk mempengaruhi hasil membuat mereka bisa memprediksi apa yang akan mereka perbuat kedepannya. Sebaliknya ketidakmampuan untuk mengerahkan pengaruh akan berdampak buruk pada kehidupan mereka seperti ketakutan pada politik, sikap apatis, dan sikap putus asa terhadap politik. Oleh karena itu, kemampuan untuk menghasilkan hasil yang bernilai dan mencegah hal yang tidak diinginkan memberikan dampak yang besar untuk mereka dan sistem politik itu sendiri.<sup>94</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Junaidi (42) mengungkapkan sebagai berikut:

“Menurut saya pendapat atau kritikan dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah itu tergantung ya... kalau pemerintah atau pejabat peduli terhadap masalah politik yang sedang terjadi itu sudah pasti karena untuk jalannya pemerintah itu sendiri juga dan menurut saya pasti terdapat pengaruh dari kebijakan dan kegiatan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari”<sup>95</sup>

Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Erlizawaty (55) mengungkapkan sebagai berikut:

“Rasanya tidak jika kita sendiri tetapi jika demo bersama-sama mungkin pendapat kita dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah, dengan kita melakukan demo belum tentu juga didengar. Pemerintah atau pejabat peduli terhadap masalah politik yang sedang terjadi itu tergantung pribadi orangnya dan menurut saya terdapat pengaruh dari kebijakan dan

---

<sup>94</sup> Albert Bandura, (1995). *Self-Efficacy in Changing Societies*. Cambridge University Press. Hlm. 2

<sup>95</sup> Wawancara informan Junaidi pada Tanggal 9 Maret 2023

kegiatan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari contohnya kenaikan harga BBM yang mempengaruhi harga pokok, harga sembako dan lain-lain”<sup>96</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Syafrudin (30) yang menyatakan sebagai berikut:

“Pendapat saya dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah saya rasa mungkin tidak dan jika pemerintah atau pejabat peduli terhadap masalah politik yang sedang terjadi itu karena yang menciptakan masalah tersebut pemerintah atau pejabat itu sendiri makanya mereka peduli serta kebijakan publik yang dibuat pemerintah tentu berefek kepada masyarakat itu sendiri”

Pernyataan dari Syafrudin juga diperkuat oleh pernyataan Yasiful (44) yang menyatakan sebagai berikut:

“Sepertinya tidak, pemerintah Indonesia sekarang itu mungkin mendekati rezim otoriter. Kalau buat rezim sekarang pandangan saya balik ke tangan dulu ya seperti orba lagi. Apakah pemerintah atau pejabat peduli dengan masalah yang terjadi itu jelas peduli karena berhubungan dengan masalah politiknya. Mungkin karena mereka memikirkan buat kepentingan mereka dan partainya tapi kalau untuk yang berhubungan dengan warga atau masyarakat Indonesia mungkin mereka tidak memikirkan serta pasti ada pengaruh kebijakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kebijakan dalam ekonomi seperti harga BBM, sembako, atau semacamnya di bidang ekonomi pasti adalah untuk kita rakyat yang kecil-kecil dibawah”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan jika pendapat mereka tidak akan mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah secara langsung dan menurut mereka apabila menempuh jalur aspirasi dengan melakukan demo bersama-sama belum tentu aspirasi yang dilakukan akan mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah. Pernyataan dari informan di atas dibenarkan oleh Andri Rusta yang menyatakan sebagai berikut:

“Efikasi politik itu kan keyakinan terhadap dirinya mempengaruhi apa yang terjadi di politik, kalau dengan demo mereka meyakini pendapat atau kritikan mereka bisa didengar atau bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah itu karena mereka merasa yakin bahwa jika dilakukan bersama- sama dengan orang lain itu akan bisa artinya dia menguatkan dirinya sendiri kalau bersama-sama pasti bisa dibandingkan jika dilakukan sendiri. Bahkan kalau bersama-sama belum tentu juga pendapat atau kritikan mereka didengar oleh pejabat atau pemerintah”<sup>97</sup>

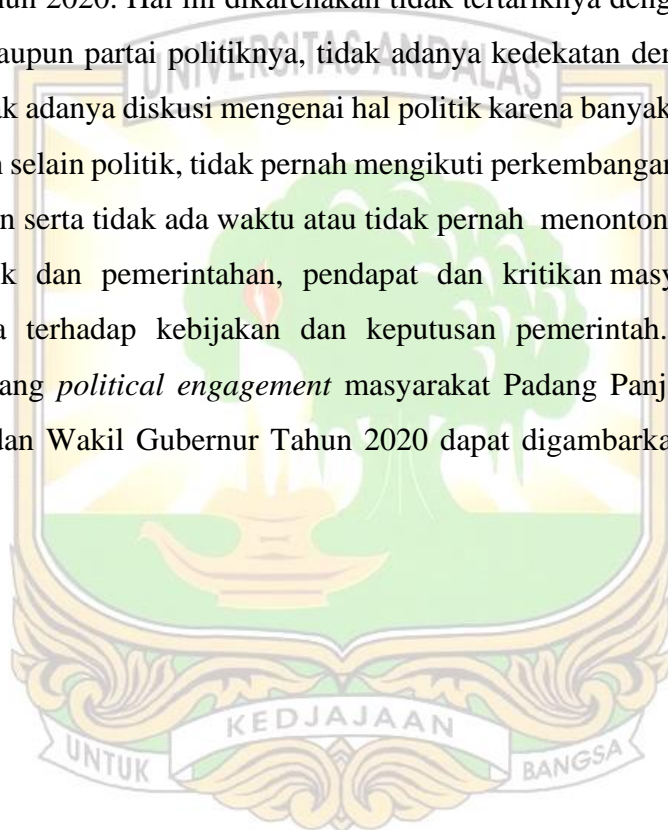
---

<sup>96</sup> Wawancara informan Erlizawaty pada Tanggal 2 Maret 2023

<sup>97</sup> Wawancara informan Andri Rusta pada Tanggal 6 Juni 2023

Hal ini yang kemudian menjadi anggapan bahwa jika pemerintah menanggapi tuntutan seseorang akan berimbas kepada partisipasi pemilih dan jika tidak menanggapi tuntutan mereka kemudian mereka merasa tidak ada perubahan akhirnya mereka menjadi Golput. Akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa sikap efikasi tidak selalu membuat seseorang terlibat secara aktif.<sup>98</sup>

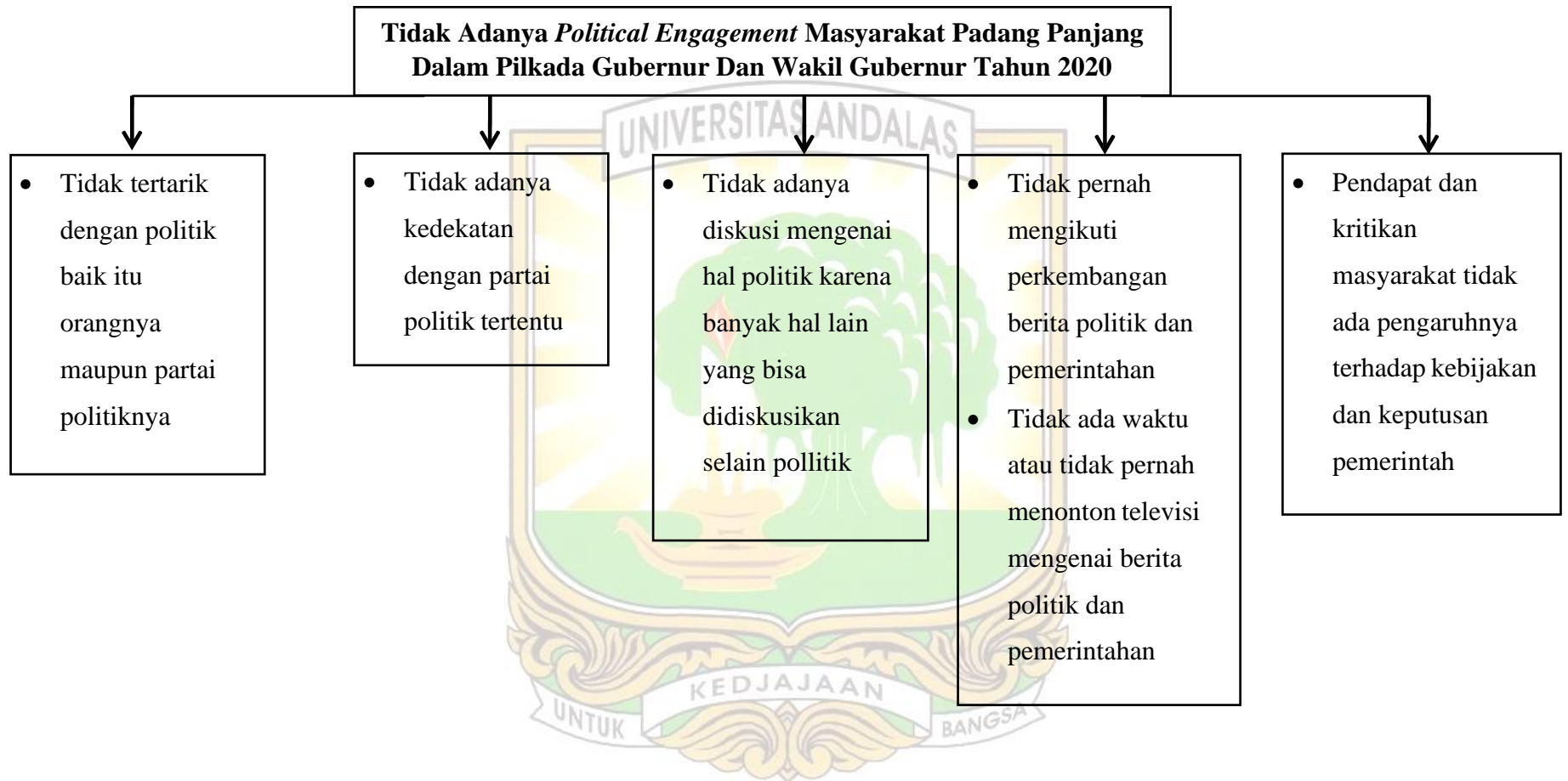
Secara umum berdasarkan penjelasan mengenai *political engagement* sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada *political engagement* masyarakat Kota Padang Panjang dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Hal ini dikarenakan tidak tertariknya dengan politik baik itu orangnya maupun partai politiknya, tidak adanya kedekatan dengan partai politik tertentu, tidak adanya diskusi mengenai hal politik karena banyak hal lain yang bisa didiskusikan selain politik, tidak pernah mengikuti perkembangan berita politik dan pemerintahan serta tidak ada waktu atau tidak pernah menonton televisi mengenai berita politik dan pemerintahan, pendapat dan kritikan masyarakat tidak ada pengaruhnya terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah. Lebih lanjutnya analisis tentang *political engagement* masyarakat Padang Panjang dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dapat digambarkan pada bagan 5.1 dibawah ini:



---

<sup>98</sup> Andi Nurcahya, Olievia Prabandini Mulyana. (2017). Perbedaan Efikasi Politik Ditinjau dari Tipe Kepribadian Introversi dan Ekstraversi Pada Dewan Perwakilan Mahasiswa. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*. 7(2):76-81

*Political Engagement* Masyarakat Padang Panjang Dalam Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020



**Bagan 5.1**



### 5.3. Konteks Rasionalitas Masyarakat Padang Panjang Ketika Memutuskan Tidak Terlibat dalam Pilgub Tahun 2020

Banyak alasan untuk seseorang untuk memilih dalam pemilu atau pemilihan begitu juga sebaliknya ada banyak alasan untuk seseorang untuk tidak memilih dalam pemilu atau pemilihan. Alasan ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik itu berasal dari individu pemilih itu sendiri maupun faktor lain seperti kualitas dan *personality* calon. Ketika keputusan untuk tidak memilih yang mereka ambil, itu bukanlah keputusan yang kebetulan semata tetapi dari keputusan hasil pemikiran dan pertimbangan yang logis. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari Maizul (57) yang menyatakan sebagai berikut:

“Mencari pemimpin itu tidak harus pintar tapi paham karena pemimpin ini adalah amanah jadi jika pemimpin tidak paham maka negara akan hancur. Jadi sosok yang saya lihat sekarang belum ada, jika ulama maju sebagai kepala daerah bukan sebagai wakil mungkin saya akan memilih. Kalau wakil itu tidak ada fungsinya menurut saya pribadi”<sup>99</sup>

Pendapat dari Maizul ini lebih ketidakadaan sosok calon yang paham akan memimpin daerah dan sosok calon haruslah paham agama agar calon tersebut bisa amanah dengan jabatannya. Pernyataan Maizul juga dikuatkan oleh Syafrudin (30) yang menyatakan sebagai berikut:

“Karena saya melihat calon-calon yang ada pada saat itu belum bisa menyakinkan saya bahwa mereka sosok yang tepat untuk memimpin Sumatera Barat”<sup>100</sup>

Tidak diragukan lagi, sosok figur seorang calon sangat menentukan masyarakat untuk ikut berpartisipasi maupun tidak. Banyaknya kontestasi mengakibatkan banyaknya figur pilihan yang akan menjadi pertimbangan masyarakat. Figur terbaik dapat memberikan kontribusi positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedepannya. Pada pemilihan kepala daerah sekarang ini diperlukan kepala daerah yang memiliki kualitas prima. Kepemimpinan kepala daerah menjadi sangat penting, bukan saja kecakapannya

---

<sup>99</sup> Wawancara informan Maizul pada Tanggal 27 Januari 2023

<sup>100</sup> Wawancara informan Syafrudin pada Tanggal 17 Februari 2023

(kapabilitas), tetapi juga integritas dan akseptabilitas di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Restu Rahmawati yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara kredibilitas dan kapabilitas figur calon terhadap partisipasi politik.<sup>101</sup>

Selain melakukan wawancara dengan Maizul dan Syafrudin, peneliti juga melakukan wawancara dengan Sovia (61) sebagai berikut:

“Waktu pemilihan berlangsung saya lagi kerja, jualan di pasar jadi tidak sempat untuk memilih, kalau saya memilih saya tidak punya uang tidak punya penghasilan”<sup>102</sup>

Pernyataan informan Sovia dibenarkan oleh marnis, yang mana pernyataannya sebagai berikut:

“Waktu hari pemilihan sedang kerja jadi tidak ada waktu memilih. Waktu memilih itu memang libur tapi saya kerja di minimarket yang liburnya sudah ditentukan harinya”<sup>103</sup>

Alasan dari Sovia dan Marnis tidak memilih dikarenakan pekerjaan yang tidak bisa digantikan. Sovia bekerja karena kebutuhan hidup, kalau tidak bekerja ia tidak memiliki penghasilan. Berbeda dengan Marnis, ia bekerja karena tugas yang telah dijadwalkan dan tidak bisa digantikan. Tidak memilih karena pekerjaan juga merupakan alasan Golput yang disebabkan hal teknis yaitu seseorang memutuskan tidak ikut memilih di waktu pemilihan karena ada keperluan dan sebagainya. Berangkat dari penjelasan di atas, Bismar Arianto menyederhanakan dan mengklasifikasikan kedalam dua kelompok besar faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya yaitu faktor dari internal dan faktor eksternal. Faktor internal dikarenakan dari dirinya sendiri, sedangkan eksternal datang dari luar dirinya sendiri. Secara lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini

---

<sup>101</sup> Restu Rahmawati. (2016). Pengaruh Figur Calon Pemimpin Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Sunter Agung Pada Pemilukada DKI Jakarta 2012. *Journal Of Governance*. 1(1):98-119

<sup>102</sup> Wawancara informan Sovia pada Tanggal 18 Februari 2023

<sup>103</sup> Wawancara informan Marnis pada Tanggal 19 Maret 2023

**Tabel 5.2**  
**Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Pemilih Golput**

No.	Internal	Eksternal
1.	Teknis	Administratif
2.	Pekerjaan	Sosialisasi
3.		Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih seperti ketidakpercayaan dengan partai, tidak mempunyai pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu maupun pilkada akan membawa perubahan, serta stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini berdasarkan temuan yang peneliti temukan berdasarkan pernyataan Erlizawaty (55) yang sebagai berikut:

“Karena saya merasa tidak ada pengaruh untuk kami dan tidak ada perubahan untuk kami juga, bisa dikatakan kecewa dengan calon dan partainya”<sup>104</sup>

Selain melakukan wawancara dengan Erlizawaty, peneliti juga melakukan wawancara dengan Syafrizal (36) menyatakan sebagai berikut:

“Dari pemilihan-pemilihan sebelumnya yang sudah jadi gubernur sama saja tidak ada perubahan, pasti ada tertinggalnya. Visi misinya tidak dipenuhinya. Menurut saya untuk calon gubernur berikutnya akan sama saja jika gaya pemerintahannya tetap begitu”<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Wawancara informan Erlizawaty pada Tanggal 2 Maret 2023

<sup>105</sup> Wawancara informan Syafrizal pada Tanggal 16 Februari 2023

Pernyataan dari Erlizawaty dan Syafrizal, dibenarkan oleh Yasiful (44) sebagai berikut:

“Karena memang saya berkeyakinan dan berprinsip dari awal memang belum percaya sama orang politik lebih lebih orang itu yang melalui jalur partai. Mungkin seandainya kemarin ada dari jalur independen saya mungkin menggunakan. Tapi kalau selagi masih dari partai saya tidak akan pernah percaya dengan orang partai. Untuk di Indonesia politiknya tidak sehat orangnya, politikusnya bisa dikatakan munafik bisa dikatakan tidak jujur”<sup>106</sup>

Berbeda dengan pernyataan dari informan sebelumnya, syahrul (68) yang merupakan penyandang disabilitas memiliki pernyataan sebagai berikut:

“alasan abang tidak memilih dikarenakan keterbatasan fisik dan sensoriknya, abang sudah lama sakit dan aktivitas sehari-hari cuma di kamar hanya bisa berbaring di kasur. Pagi-pagi ada perawat yang membersihkan dan memandikannya, jadi begini keadaan abang kenapa tidak bisa memilih ketika itu”<sup>107</sup>

Peneliti dibantu oleh Ibu Nursyamsu ketika mewawancari Pak Syahrul. Ibu Nursyamsu merupakan adik dari Pak Syahrul yang tinggal satu rumah bersama beliau. Informan Syahrul (68 Tahun) merupakan penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik dan sensorik sejak lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Dalam Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Syahrul (68 Tahun) yang berada di TPS 3 Kecamatan Padang Panjang Barat Kelurahan Balai-Balai ini dikategorikan sebagai pemilih disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera yang kemudian merujuk pada kondisi ketidakfungsian salah satu organ yang disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit. Padahal untuk sosialisasi, sosialisasi disabilitas menjadi prioritas oleh KPU. Hal ini berdasarkan temuan peneliti yang peneliti temukan di lapangan dengan Informan Winda Aprizona (40) selaku informan triangulasi yang pernyataannya sebagai berikut:

---

<sup>106</sup> Wawancara informan Yasiful pada Tanggal 26 Januari 2023

<sup>107</sup> Wawancara informan Syahrul pada Tanggal 5 April 2023

“Sosialisasi dengan penyandang disabilitas ini menjadi prioritas kami, khusus disabilitas ini mereka meminta diadakan 100 orang dan kami memenuhinya. Permintaan ini dari kelompok PDPP (Penyandang Disabilitas Padang Panjang) dan itu kami laksanakan di dinas sosial yang pesertanya 100 orang. Padahal untuk per segmen sosialisasi hanyadibolehkan 20 orang dikarenakan kondisi covid tetapi untuk penyandang disabilitas kami berikan seluruhnya. Alasan kenapa Golput untuk kategori disabilitas ini tinggi juga karena mereka berprinsip kalau memilih pun mereka tidak juga diperhatikan, semua pemilihan sama saja, saat kampanye iyalah setelah terpilih tidak ada diperhatikan lagi”<sup>108</sup>

Berbeda dengan Syahrul yang Golput dikarenakan keterbatasan fisiknya, alasan penyebab Golput lainnya bisa terjadi dikarenakan lagi sakit pada waktu hari pemilihan. Hal ini dijelaskan oleh Hayatul Ilham (17) yang pernyataannya sebagai berikut:

“Kondisi lagi sakit waktu itu, lagi demam, jadinya saya tidak bisa mengikuti pemilihan pada waktu itu”<sup>109</sup>

Penyebab Golput lainnya yaitu adanya kegiatan lain seperti ada urusan keluarga, lagi keluarga kota dan sebagainya. Hal ini berdasarkan temuan peneliti temukan dilapangan berdasarkan informasi dari Abrar (27) yang menyatakan sebagai berikut:

“Waktu pemilihan gubernur kebetulan saya ada di luar kota ditempat saudara ada acara kegiatan urusan keluarga”<sup>110</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Putri Rahma Sari (23) yang menyatakan sebagai berikut:

“Waktu pemilihan itu kebetulan lagi ada dikampung orang tua, ada urusan keluarga”<sup>111</sup>

Pernyataan informan Abrar dan Putri Rahma Sari juga dibenarkan oleh Junaidi (42) yang pernyataannya sebagai berikut:

---

<sup>108</sup> Wawancara informan Winda Aprizona pada Tanggal 24 Maret 2023

<sup>109</sup> Wawancara informan Hayatul Ilham pada Tanggal 24 Maret 2023

<sup>110</sup> Wawancara informan Abrar pada Tanggal 12 Februari 2023

<sup>111</sup> Wawancara informan Putri Rahma Sari pada Tanggal 18 Februari 2023

“Tidak sempat memilih karena satu keadaan jadi terlambat ke TPS. Karena urusan keluarga”<sup>112</sup>

Faktor teknis ini menurut Bismar Arianto merupakan pemahaman yang dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah, sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti disebut dengan teknis mutlak. Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melekat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan.<sup>113</sup>

Sementara itu sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu atau pemilihan sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir Golput. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah mensosialisasikan calon yang berpartisipasi dan kapan tanggal pemilihan berlangsung. Kondisi inilah yang menuntut pentingnya sosialisasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu atau pemilihan dan meminimalisir angka Golput dalam setiap pemilu dan pemilihan. Terlepas dari semua itu, tidak semua penduduk yang tahu akan informasi pemilu. Bagi penduduk yang daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah dengan akses sulit akan informasi maupun transportasi, maka sosialisasi diperlukan untuk mengurangi angka Golput.

Walaupun sosialisasi telah dilakukan tetapi Golput di Kota Padang Panjang tetaplah tinggi. Hal ini menurut Winda Aprizona selaku informan triangulasi dikarenakan sebagai berikut:

“Di Pemilihan Gubernur, menurut kami penduduk Padang Panjang dan yang benar-benar yang ber-KTP Padang Panjang dan ada di Padang Panjang hanyalah 70% yang ada terdata di capil Padang Panjang, dan itu masyarakatnya kebanyakan pas lebaran saja pulangnyanya. Waktu pemilihan,

---

<sup>112</sup> Wawancara informan Junaidi pada Tanggal 9 Maret 2023

<sup>113</sup> Bismar Arianto. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*. 1(1):51-60

yang mahasiswa-mahasiswi yang kuliah diluar daerah itu tidak ada yang pulang, kebanyakan penduduk tidak ada ditempat pada saat pemilihan.<sup>114</sup>

Pernyataan Winda Aprizona selaku informan triangulasi dikuatkan oleh pernyataan Maira Nasrul (21) sebagai berikut:

“Waktu itu tidak ikut karena kuliah di Padang. Karena libur cuma satu hari jadi malas untuk pulang buat memilih dan untuk sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kota Padang Panjang saya tidak tahu karena saya ada kegiatan kuliah di Padang. Jadinya, saya tidak mengetahui ada atau tidak sosialisasi yang dilakukan KPU”<sup>115</sup>

Selain alasan yang dijelaskan sebelumnya, menurut Winda Aprizona kenapa Kota Padang Panjang Golputnya tinggi dikarenakan wilayah Padang Panjang merupakan kota kecil tetapi memiliki daerah *hinterland* yang besar.<sup>116</sup> Penduduk *hinterland* banyak yang ber-KTP Padang Panjang itu karena kebutuhan mereka itu untuk sekolah, sekolah anak mereka. Jadi, kadang-kadang waktu pileg mereka dimobilisasi oleh orang-orang yang membantu mereka untuk dapat ber-KTP Padang Panjang. Waktu pileg, orang yang membantu mereka ini membutuhkan KTP yang banyak sedangkan orang yang dimobilisasi membutuhkan tangan orang seperti ini untuk anak mereka agar bisa bersekolah di Padang Panjang.

Tujuan orang-orang daerah *hinterland* yang ber-KTP Padang Panjang ini murni memang rata-rata untuk anak sekolah karena kalau untuk bantuan, RT setempat akan mencoret dan menyisahkan mereka karena orangnya tidak ada. Makanya, hal ini berdampak ke Golput waktu pilgub karena data pemilih daerah *hinterland* yang sudah terdata waktu pileg dan mereka sudah memilih calonnya waktu pileg sehingga waktu pilgub mereka tidak ada keinginan untuk memilih lagi karena sudah tidak ada kepentingan lagi. Upaya untuk menekan angka Golput juga telah dilakukan oleh KPU Kota Padang Panjang seperti sosialisasi di Tahun 2015 yang begitu massif dan aktif.

---

<sup>114</sup> Wawancara informan Winda Aprizona pada Tanggal 24 Maret 2023

<sup>115</sup> Wawancara informan Maira Nasrul pada Tanggal 30 Januari 2023

<sup>116</sup> Daerah *hinterland* adalah daerah dimana luasnya relatif besar dan tidak mengenal batas administratif suatu daerah, propinsi, atau batas suatu negara atau bisa disebut juga daerah perbatasan antar suatu daerah dengan daerah lain

Salah satu kelurahan di Padang Panjang yaitu tanah pak lambik yang kebanyakan berbasis Jawa, mereka turun dengan reognya untuk memassifkan sosialisasi selama satu bulan. Masyarakat banyak yang keluar untuk menyaksikan tetapi yang terjadi waktu pemilihan tetap begitu juga. Hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Kabupaten/Kota lain sudah dilakukan oleh Padang Panjang di Tahun 2015 dan hasilnya tetap nomor satu terendah dalam hal partisipasi. Waktu sosialisasi di Tahun 2020 permasalahan yang muncul yaitu sosialisasi di tengah wabah covid-19. Permasalahan ini juga dijelaskan oleh Winda Aprizona sebagai berikut:

“Tahun 2020, walaupun kita terkendala covid-19 tetapi sosialisasi tetapharus dijalankan. Acara sosialisasi dijalankan tetapi harus dibatasi, jadi satu sosialisasi itu dibatasi 20 orang per sosialisasinya dan anggaran waktu itu juga terbatas, Karena dibatasi jumlah orangnya kami pun menyiasati dengan melirik semua organisasi yang ada contohnya keagamaan dan disabilitas. Biasanya keagamaan tidak merambah ke semua agama tetapi ini semuanya kami libatkan. Paguyuban-paguyuban juga kami undang seperti paguyuban Palembang, Jawa, dan Batak. Jadi, Sosialisasinya kami tingkatkan kesitu dan sosialisasinya kami adakan di Kota tidak di kelurahan atau di Kecamatan. Jadi, diambil perwakilan tiap organisasi atau lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) per kelurahan lalu dikumpulkan di Kota. Padang Panjang itu kota kecil, jadi orang-orangnya itu-itu saja makanya dipusatkan di kota”<sup>117</sup>

Pernyataan dari informan Winda Aprizona ini sesuai dengan temuan yang peneliti temukan di lapangan, dari 16 orang informan yang peneliti wawancarai, yang mengatakan ada sosialisasi dari KPU Kota Padang Panjang cuma 5 orang selebihnya 4 orang tidak tahu karena sibuk kerja, 6 orang mengatakan tidak ada, dan 1 orang tidak tahu karena lagi kuliah. Hal ini menjawab temuan peneliti dikarenakan sosialisasi dari KPU Kota Padang Panjang hanya mencakup di Kota saja tidak sampai ke kecamatan dan kelurahan maupun daerah-daerah yang minim informasi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi seputar pilkada atau pemilihan. Minimnya sosialisasi yang dilakukan di Tahun 2020 disebabkan banyak faktor seperti situasi covid yang sedang terjadi, sosialisasi yang dibatasi orangnya serta anggaran yang terbatas. Anggaran yang terbatas membuat sosialisasi tidak bisa diadakan di kecamatan atau di kelurahan.

---

<sup>117</sup> Wawancara informan Winda Aprizona pada Tanggal 24 Maret 2023



Sosialisasi dari partai politik seperti kampanye juga dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Kampanye diartikan sebagai serangkaian usaha dan tindakan komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar khalayak yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terorganisir dalam suatu proses pengambilan keputusan dan dilakukan secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu.<sup>118</sup> Kampanye adalah salah satu bentuk dari komunikasi politik yang bertujuan membangun citra politik. Karena itu komunikasi politik memiliki fungsi yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan Yasiful didapatkan pernyataan sebagai berikut:

“Sepertinya tidak ada kampanye yang dilakukan oleh tim kemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur waktu Tahun 2020 yang lalu”<sup>119</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh informan Maizul sebagai berikut:

“Di tempat tinggal saya tidak ada kampanye yang dilakukan oleh tim kemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, kalau di tempat lain atau di kelurahan lain mungkin ada, di tempat saya tidak ada”<sup>120</sup>

Pernyataan informan Yasiful dan informan Maizul, dikuatkan oleh pernyataan informan Syafrudin sebagai berikut:

“Seingat saya tidak ada atau saya yang tidak memperhatikan jika ada kampanye yang dilakukan oleh tim kemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur”<sup>121</sup>

Pernyataan dari informan sebelumnya dibenarkan oleh Winda Aprizona selaku informan triangulasi sebagai berikut:

“Mungkin karena daerah Padang Panjang itu kecil makanya tidak pernah dilirik oleh paslon. Jadi, paslon terakhir datang ke Padang Panjang itu Tahun 2010. Waktu pilgub Tahun 2010 salah satu calon yaitu Fauzi Bahar

<sup>118</sup> Habiburrahman, H. Arsyad Abd. Gani, Irma Setiawan. (2020). Strategi Tindak Tutur Komisif dalam Kampanye Politik Pilkada Serentak 2018. Jurnal Ilmiah telaah. 5(1):1-7

<sup>119</sup> Wawancara informan Yasiful pada Tanggal 26 Januari 2023

<sup>120</sup> Wawancara informan Maizul pada Tanggal 27 Januari 2023

<sup>121</sup> Wawancara informan Syafrudin pada Tanggal 17 Februari 2023

setelah itu paslon tidak pernah datang lagi ke Padang Panjang. Akhirnya animo masyarakat itu tidak tinggi lagi setiap pilgubnya. Tahun 2020 ketika sosialisasi dengan LO (Liaison Officer) atau naradamping, kami mensosialisasikan kalo bisa datanglah ke Padang Panjang, sosialisasilah di Padang Panjang atau kampanye di Padang Panjang karena Padang Panjang ini tidak pernah dilirik sama sekali sama paslon”<sup>122</sup>

Tidak adanya kampanye yang dilakukan oleh paslon atau tim kemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi salah satu alasan kenapa tingkat partisipasi di Kota Padang Panjang setiap pilgub selalu rendah. Banyaknya perhitungan yang akan diambil oleh paslon menjadi salah satu alasan untuk tidak berkampanye di Kota Padang Panjang karena kampanye politik merupakan suatu langkah yang sangat krusial yang membutuhkan penanganan secara matang, oleh sebab itu, jika tidak dipersiapkan dengan matang hasil suara pemilihan dapat berdampak fatal seperti kerugian waktu, biaya, dan tenaga.<sup>123</sup> Karena Padang Panjang daerahnya kecil dan tidak begitu signifikan pengaruh suaranya menjadi alasan paslon tidak berkampanye di kota tersebut. Paslon akan fokus berkampanye ke Kabupaten/Kota yang memiliki daftar pemilih yang besar yang bisa meningkatkan jumlah suaranya ketimbang daerah kecil.

Menanggapi pernyataan rasionalitas pemilih di atas, Andri Rusta (41) menyatakan sebagai berikut:

“Alasan itu kan banyak, paling banyak kejadian itu di hari H pemilihan tapi ada juga karena kelalaian mereka seperti dia diluar kota tapi tidak mengurus a5, tapi kemudian hal-hal seperti itu seharusnya bisa diantisipasi, yang tidak bisa diantisipasi tadi orang-orang yang faktor politik, dia tidak percaya pemilu, tidak ada sosok yang tepat bagi mereka, apalagi tahun 2020 Padang Panjang tidak pilwako, berdiri sendiri cuma pilgub. Apalagi jumlah penduduknya kecil yang menjadikan tidak ada perhatian bagi calon gubernur, ketika seperti itu maka disinilah masalahnya. Jika ada 2 pemilihan pilwako dan pilgub, orang-orang mungkin bergerak karena sekaligus ke TPS, tapi karena sendirian dan itu juga cuma pilgub makanya ada juga orang yang malas ke TPS. Selanjutnya karena jauh rentang kedekatan dengan si calon karena tidak ada calon dari tempat mereka maka wajar orang tidak tertarik, ketertarikan memilihnya pun menjadi berkurang, sebenarnya alasan yang banyak itu alasan teknis tapi kemudian ada juga

---

<sup>122</sup> Wawancara informan Winda Aprizona pada Tanggal 24 Maret 2023

<sup>123</sup> Wahyu Budi Nugroho, Skripsi: *“Kampanye Politik dan Pemilihan Kepala Daerah”* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 6

alasan-alasan faktor politik. Saya rasa kenapa golput padang Panjang tinggi karena alasan kedekatan tadi dengan calon tadi, karena tidak ada calon dari sana. Kemudian juga jumlah dpt yang kecil maka paslon tidak melirik dibandingkan menghabiskan waktu di Padang Panjang baguslah ditempat lain ditambah sosialisasi dari kpu yang kurang, faktor-faktor itu diakumulasikan yang kemudian menjadi negatif. Hal itulah yang menyebabkan golput”<sup>124</sup>

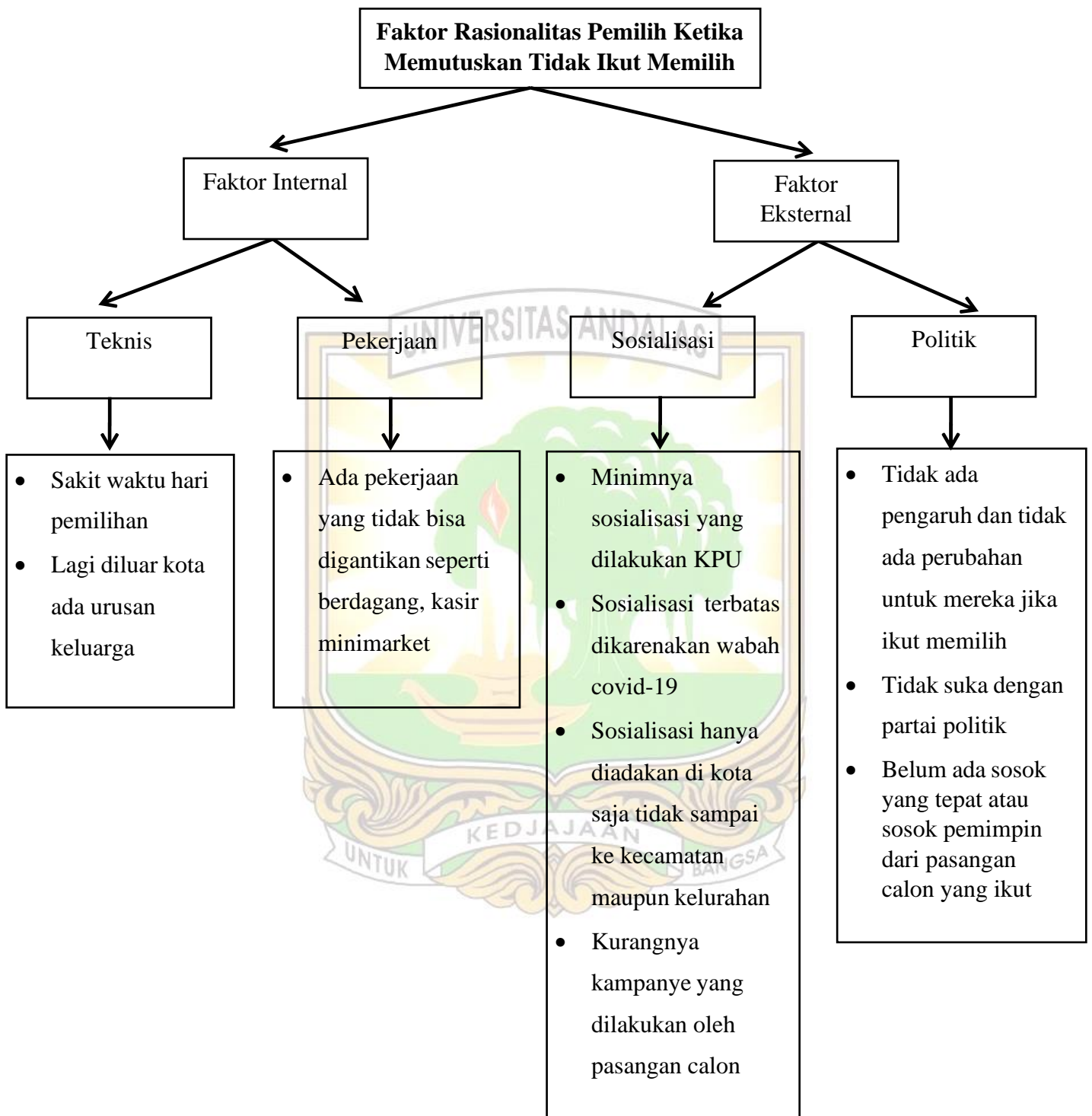
Berdasarkan penjelasan mengenai konteks rasionalitas masyarakat Padang Panjang ketika mereka memutuskan untuk tidak terlibat dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan konteks rasionalitas masyarakat Padang Panjang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu teknis dan pekerjaan. Teknis dikarenakan sakit waktu hari pemilihan dan ada urusan keluarga di luar kota. Pekerjaan dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa digantikan. Sedangkan faktor eksternal yaitu sosialisasi dan politik. Sosialisasi dikarenakan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, sosialisasi terbatas yang disebabkan wabah covid-19, sosialisasi hanya dilakukan di kota saja tidak sampai ke kecamatan maupun kelurahan, kurangnya kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon.

Selanjutnya politik dikarenakan tidak ada pengaruh dan tidak ada perubahan untuk mereka jika ikut memilih, tidak suka dengan partai politik, dan belum ada sosok yang tepat atau sosok pemimpin dari pasangan calon yang ikut. Lebih lanjutnya analisis tentang konteks rasionalitas masyarakat Padang Panjang ketika mereka memutuskan untuk tidak terlibat dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 dapat digambarkan pada bagan 5.2 dibawah ini:

---

<sup>124</sup> Wawancara informan Andri Rusta pada Tanggal 6 Juni 2023

**Konteks Rasionalitas Masyarakat Padang Panjang Ketika Mereka  
Memutuskan Untuk Tidak Terlibat Dalam Pilkada Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Tahun 2020**



**Bagan 5.2**